

# Kata Pengantar

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020 ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PER-SEKJEN/2012 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. LK ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat selama Tahun 2020 dalam rangka pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Setjen DPR RI Tahun 2016-2019, yang telah diubah dengan Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024.

Laporan ini disajikan agar memberikan gambaran yang jelas dan obyektif kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI mengenai kinerja Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat. Didalamnya diuraikan baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala dan permasalahan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2020.

Semoga LAKIP Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, terutama sebagai bahan masukan dalam rangka perumusan kebijakan ke depan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, Januari 2021

Kepala Biro Hukum dan Pengaduan  
Masyarakat,

**Juliasih, S.H., MH.**  
**NIP. 19610725 19**

# Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK) Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI Tahun 2020 merupakan dokumen untuk mempertanggungjawabkan baik dalam hal kinerja keberhasilan maupun kekurangberhasilan atas pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020. Pelaksanaan Kegiatan dimaksud tentunya didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran Setjen DPR RI yang tertuang dalam Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, yaitu "Menjadi Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional dan modern dalam mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan hingga sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020 - 2024 telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 Biro Hukum dan Dumas meliputi 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Keempat IKU tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU kegiatan Satker Dewan dan 3 (tiga) IKU kegiatan Satker Setjen. Pengukuran kinerja dalam laporan ini diperhitungkan berdasarkan capaian kinerja program/kegiatan dan capaian kinerja keuangan.

Secara singkat, capaian kinerja kegiatan untuk IKU Satker Dewan pada jumlah pemberian pertimbangan dan advokasi hukum dengan target 16 dokumen dapat terealisasi sebanyak 16 kajian (100%). Sedangkan untuk 3 (tiga) IKU Setjen dengan indikator jumlah perumusan

produk hukum ditargetkan sebanyak 43 dokumen dan dapat direalisasikan sebanyak 100%. Indikator pengembangan JDIH, rencana kegiatan, rencana keuangan, laporan pertanggung jawaban, bagian hukum, laporan kinerja bagian hukum; dan laporan tim bagian hukum, dapat direalisasikan 100%. Sedangkan indikator jumlah analisis surat pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Dewan dan Setjen DPR RI, berupa surat kepada Pimpinan dapat terealisasi 95%, dan surat kepada komisi/AKD teralisasi 67%. Selain itu, jumlah surat *website* dan SMS yang disampaikan kepada Dewan dan Setjen dapat terealisasi sebanyak 95%.

Sedangkan dari realisasi anggaran 2020 dibandingkan tahun 2019 untuk Satker baik Dewan maupun Setjen telah terjadi penurunan sejak awal kegiatan. Pada satker Dewan untuk tahun 2019 sebesar 1.511.388.000,- dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 1.495.336.000,- yaitu turun sebesar Rp. 16.052.000,- atau 1,06 %. Demikian pula halnya alokasi anggaran untuk Satker Setjen tahun 2020 juga terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, dimana pada anggaran satker Setjen tahun 2019 sebesar Rp. 3.422.203.000,- dan pada tahun anggaran 2020 menjadi sebesar yaitu 1.845.532.000,-, atau turun sebesar Rp. 1.576.671.000,- atau 46,07 %.

Dalam proses berjalannya kegiatan pada tahun 2020, terjadi penghematan atau pemangkasan anggaran untuk alokasi penanganan akibat dampak *covid 19* dengan dilakukan revisi anggaran Biro Humas dan Dumas, yaitu

untuk Satker Dewan revisi terakhir menjadi sebesar Rp. 545.322.000,- dan anggaran Satker Setjen menjadi sebesar Rp. 1,390,517,000,- dan telah dapat direalisasikan selama empat triwulan sebesar Rp.1.357.929.600,- atau 97,66 %.

Satker Setjen dengan tingkat penyerapan atau realisasi anggaran sebesar 1,357,929,600 atau 97.66%, dapat disimpulkan bahwa penyerapannya sudah sangat baik dalam arti realisasi anggaran dapat dicapai dengan optimal. Adapun target kinerja tupoksi tetap sesuai target 100 %. Kondisi ini juga menunjukkan, bahwa untuk Satker Setjen justru terjadi optimalisasi realisasi anggaran, dengan penyerapan 97,66 % mengingat adanya revisi atau pengalihan sebagian anggaran dari pagu anggaran Satker Setjen semula untuk keperluan penanggulangan penanganan akibat dampak covid 19 sebesar Rp. 455.015,000,- tanpa mempengaruhi kinerja program/kegiatan Biro Hukum dan Dumas, yang tetap dapat mencapai target, seperti dalam penanganan dukungan perkara hukum dan analisis surat aspirasi pengaduan masyarakat.

Selanjutnya, dalam upaya memperbaiki kinerja Tahun 2020 di Biro Hukum dan Dumas dalam menghadapi tantangan ke depan antara lain:

1. Perlunya meningkatkan koordinasi yang intensif baik internal dan eksternal antara para pejabat dan pegawai di lingkungan Biro Hukum dan Dumas, guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Setjen yang tertuang dalam Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024.
2. Meningkatkan komitmen antar unit kerja di lingkungan Biro Hukum dan Dumas dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
3. Perlunya komitmen dari seluruh jajaran JPT dalam memenuhi target program yang telah ditetapkan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan anggaran secara efisien dan efektif melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada *outcome* sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai, serta dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak.
5. Meningkatkan pembinaan SDM pegawai, baik kualitas maupun kompetensi, juga memperhatikan jumlah agar sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang tugas dan fungsi unit kerja-unit kerja di lingkungan Biro Hukum dan Dumas.
6. Mengoptimalkan kinerja kegiatan dengan memperhatikan penyerapan anggaran – sesuai rencana yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

7. Mengoptimalkan dukungan terhadap peran lembaga Setjen DPR RI sebagai unsur pendukung (*supporting system*) DPR RI dengan tetap memperhatikan dinamika lembaga DPR RI sebagai lembaga politik, dan diupayakan agar tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan negara.
8. Perlunya perbaikan Aplikasi Pengaduan Masyarakat dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIIH) di Lingkungan Setjen DPRRI khususnya untuk sistem JDIIH (*jdih.dpr.go.id*) yang saat ini masih dalam domain website DPR RI agar dapat segera terintegrasi dengan sistem JDIIH Nasional.



# Daftar Isi

Kata Pengantar	i	
Ringkasan Eksekutif	iii	
Daftar Isi	ix	
<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>	1
	A. Umum	1
	B. Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai Serta Alokasi Anggaran	3 7
	C. Permasalahan Strategis	
<b>Bab II</b>	<b>Perencanaan dan Perjanjian Kinerja</b>	9
	A. Rencana Strategis Biro Hukum dan Dumas	9
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	10
<b>Bab III</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	15
	A. Pengukuran Capaian Kinerja	16
	B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
	C. Akuntabilitas Keuangan	25
<b>Bab IV</b>	<b>Penutup</b>	35



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. UMUM**

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Biro Hukum dan Dumas) adalah salah satu unit kerja Eselon II dibawah Deputy Bidang Administrasi pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Sebagai bagian yang penting dari Deputy Bidang Administrasi, kinerja Biro Hukum dan Dumas diharapkan akan menunjang kinerja Setjen DPR RI dalam memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada DPR RI.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018, menyatakan bahwa Biro Hukum dan Dumas terdiri dari 2 (dua) Unit kerja yaitu Bagian Hukum dan Bagian Pengaduan Masyarakat.

Biro Hukum dan Dumas sebagai bagian dari Deputy Bidang Administrasi Setjen DPR RI, diharapkan mampu melaksanakan tugas dan tata kelola organisasi dengan capaian

kinerja yang professional, sesuai dengan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu **akuntabilitas**. Dalam hal ini sebagai instansi pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan adalah bahwa setiap instansi pemerintah mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Substansi dari SAKIP adalah penyelarasan atau penyesuaian antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan atau penyesuaian ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Strategis dalam jangka menengah (5 tahun), yang diwujudkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra), kemudian dioperasionalkan dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja pada tiap tahunnya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hukum dan Dumas Tahun 2020 ini adalah salah satu wujud rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan bentuk

pertanggungjawaban dan sekaligus evaluasi kinerja atas kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Pelaporan kinerja mengungkapkan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan maupun kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Hal tersebut harus terangkum dalam LK, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI PEGAWAI SERTA ALOKASI ANGGARAN BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT**

### **1. Struktur Organisasi**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018 menegaskan bahwa, Biro Hukum dan Dumas mempunyai tugas melaksanakan dukungan dibidang hukum dan pengaduan masyarakat. Dalam Pasal 23, menyebutkan bahwa Biro Hukum dan Dumas terdiri atas dua unit kerja yaitu :

- a. Bagian Hukum;
- b. Bagian Pengaduan Masyarakat.

Adapun struktur organisasi Biro Hukum dan Dumas dapat disampaikan dibawah ini sebagaimana Gambar 1.1

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat**



## **2. Komposisi Pegawai**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Hukum dan Dumas perlu –didukung oleh sumber daya manusia (SDM)

yaitu para pegawai yang handal, dengan kualitas dan kuantitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berdasarkan data dari Bagian Kepegawaian sampai dengan Desember 2020 komposisi jumlah pegawai Biro Hukum dan Dumas sebanyak 34 orang pegawai, terdiri dari pejabat struktural 8 (delapan) orang, 3 (tiga) orang fungsional tertentu analis kebijakan, 20 orang staf pelaksana, serta 3 (tiga) orang PPN-ASN (Pegawai Pemerintah Non ASN). Secara keseluruhan jumlah pegawai di lingkungan Biro Hukum dan Dumas sebagaimana Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Jumlah Pegawai Biro Hukum dan**  
**Pengaduan Masyarakat**

No	Biro	Pejabat Struktural	Pelaksana	Pejabat Fungsional	PPN-ASN	Jumlah
1	Biro Hukum	1	0	1	2	4
2	Bagian Hukum	4	11	2	-	17
3	Bagian Pengaduan Masyarakat	3	9	0	1	13
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>34</b>

*Sumber : Data Bagian Kepegawaian, Desember 2020*

### 3. Alokasi Anggaran

Selanjutnya, dari sisi dukungan anggaran untuk Biro Hukum dan Dumas, maka untuk alokasi anggaran pada tahun 2020 semula sebesar 3.340.868,000,. (*Tiga milyar tiga ratus*

*empat puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah),* terbagi dalam Satker Dewan semula sebesar Rp. 1.495.336.000,- (*Satu milyar empat ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), setelah direvisi menjadi sebesar Rp. 545.322.000,- (*Lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah*). Untuk Satker Setjen semula Rp. 1.845,532,000,- (*Satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), setelah direvisi menjadi Rp. 1,390,517,000,- (*Satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah*).

Perbandingan dan penurunan alokasi anggaran di Biro Biro Hukum dan Dumas dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Persandingan Alokasi Anggaran Biro Hukum dan Dumas Tahun 2020**

No.	SATUAN KERJA	ALOKASI ANGGARAN		
		TAHUN 2019	<i>Sebelum revisi</i> TAHUN 2020	<i>Setelah revisi</i> TAHUN 2020
1.	Satker Dewan	1.511.388.000,-	1.495.336.000,-	545.322.000,-
2.	Satker Setjen	3.422.203.000,-	1.845,532,000,-	1,390,517,000,-
	JUMLAH	4.933.591.000,-	3,340,868,000,-	1.935,839.000,-
	Turun			2,997,752,000,- (60,76%)

*Sumber : Data Biro Keuangan, 2020.*

Namun demikian, dengan adanya pandemik Covid 19 dan dengan tujuan untuk penanggulangan dampak pandemi covid 19 tersebut, Pemerintah telah melakukan pemotongan postur APBN baik untuk Anggaran Dewan maupun anggaran Setjen, sehingga menyebabkan anggaran yang dikelola oleh Biro Hukum dan Dumas beberapa kali harus mengalami revisi, yang berakibat pada makin mengecilnya jumlah alokasi anggaran yang dikelola oleh Biro Hukum dan Dumas.

### **C. PERMASALAHAN STRATEGIS BIRO HUKUM DAN DUMAS**

Permasalahan strategis yang dihadapi Biro Hukum dan Dumas pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tupoksi Biro Hukum dan Dumas sangat tergantung dari pihak lain, sehingga antara perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan terjadi deviasi, misalnya kegiatan perumusan produk hukum, yang masih terkendala dari kesiapan Unit-Unit Pengusul yang tidak melengkapi dokumen pengusulan produk hukum dimaksud, sehingga memperlambat proses pembahasan ataupun penyelesaian produk hukum tersebut.
2. Penanganan perkara hukum (gugatan) yang ditangani oleh Biro Hukum dan Dumas, yang ditujukan kepada Dewan ataupun Setjen DPR RI, yang dalam hal ini penyelesaiannya sangat

tergantung dari perkara yang diajukan dan tergantung pula pada kesiapan pihak-pihak lain (Tim Hukum DPR dan Pihak Pengadilan).

3. Kegiatan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (SJDIH) terhambat pada proses *update* integrasi disebabkan belum dibuat dalam sub-domain JDIH ("jdih.dpr.go.id") di website DPR tersendiri, dan masih menggunakan *sub-directory* dari laman *website* DPR RI yaitu *dpr.go.id/jdih*. Kondisi ini menjadi hambatan utama JDIH DPR RI tidak dapat terintegrasi dengan JDIHN yang dikelola Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Untuk itu perlu adanya dorongan dan dukungan dari pihak-pihak terkait terutama Pimpinan Setjen DPR RI agar JDIH DPR RI dapat segera terintegrasi ke dalam sistem JDIHN.
4. Surat - surat masuk pengaduan masyarakat yang telah dianalisa dan ditangani oleh Bagian Dumas, tindak lanjutnya di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan, mengingat hal tersebut merupakan sepenuhnya kewenangan Pimpinan dan AKD DPR RI.
5. Penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi pengaduan masyarakat masih terkendala pada sistem, sehingga pengelolannya belum dapat dilaksanakan secara optimal.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM DAN DUMAS**

Biro Hukum dan Dumas sebagai unit eselon II memiliki tujuan untuk mendukung visi, misi dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI yang tertuang dalam Persekjen No. 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Visi Setjen DPR RI adalah ***"Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"***. Sedangkan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih; dan
3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen Penetapan Kinerja (PK), maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai bagian dari capaian kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI telah menetapkan PK untuk Biro Hukum dan Dumas sesuai dengan indikator yang telah disempurnakan.

PK Biro Hukum dan Dumas yang disempurnakan merupakan sasaran program/kegiatan gabungan untuk satuan kerja Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI. PK yang telah dilakukan revisi tersebut disampaikan secara keseluruhan yang merupakan satu sasaran program/kegiatan Biro Hukum dan

Dumas dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2020**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dukungan Hukum dan Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai indeks Area Penataan Peraturan produk hukum dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</li> <li>2. Persentase pertimbangan hukum kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;</li> <li>3. Persentase analisis surat aspirasi dan Pengaduan Masyarakat yang sesuai SOP.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">3,5</p> <p style="text-align: center;">100 %</p> <p style="text-align: center;">90%</p>

Atas dasar Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2020 tabel 2.1 diatas, maka ditetapkan sasaran program/kegiatan di Bagian Hukum dan Bagian Dumas, sebagaimana pada tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian, teknis, dan administrasi dalam pemberian pertimbangan dan advokasi bagi DPR RI dan Setjen DPR RI.	Jumlah pemberian pertimbangan dan advokasi hukum	16 dokumen
2	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian, teknis dan administrasi dalam perumusan produk hukum DPR RI dan Setjen DPR RI.	Jumlah perumusan produk hukum	43 dokumen
4	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian, teknis dan administrasi dalam dokumentasi dan informasi hukum.	a. Pengembangan JDIH; b. Rencana Kegiatan Bagian Hukum; c. Rencana Keuangan Bagian Hukum; d. Laporan Pertanggungjawaban Bagian Hukum; e. Laporan Kinerja Bagian Hukum; f. Laporan Tim Bagian Hukum.	10 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 13 dokumen

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas)**  
**Tahun 2020**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas analisis surat pengaduan masyarakat dan permasalahan yang di sampaikan kepada Dewan dan Setjen DPR RI. (Surat Pimpinan dan AKD), Website dan SMS.	<p>a. Jumlah analisis surat pengaduan masyarakat dan permasalahan yang disampaikan kepada Dewan dan Setjen DPR RI;</p> <p>b. Jumlah surat website dan SMS yang disampaikan kepada Dewan dan Setjen DPR RI.</p>	<p>Surat Pimpinan 300 surat</p> <p>Surat Komisi/Badan 700 surat</p> <p>Surat website dan SMS 1000 surat</p>



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Untuk membuktikan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja (PK) Biro Hukum dan Dumas Tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Pokok (IKP) dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat keberhasilan pencapaian

target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2020.

## A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan PK dengan realisasinya. Untuk seluruh sasaran program, indikator kinerja program, target, realisasi dan capaian Biro Hukum dan Dumas Tahun 2020 (4 sasaran program) dapat ditampilkan pada Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2020**

No.	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian, teknis, dan administrasi dalam pemberian pertimbangan dan advokasi bagi DPR RI dan Setjen DPR RI.	Jumlah pemberian pertimbangan dan advokasi hukum	16 dokumen	5 dokumen (SK DPR) 5 dokumen (SK Pimpinan) 1 dokumen (SK Sekjen) 2 dokumen (SK KPA) 2 kajian 1 advokasi	100 %

No.	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian, teknis dan administrasi dalam perumusan produk hukum DPR RI dan Setjen DPR RI.	Jumlah perumusan produk hukum	43 dokumen	10 dokumen (Persekjen) 1 dokumen (proleg) 1 dokumen (evaluasi) 24 dokumen (MoU) 12 dokumen (Naskah Kebijakan)	100 %
3	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian, teknis dan administrasi dalam dokumentasi dan informasi hukum.	a. Pengembangan JDIH; b. Rencana Kegiatan Bagian Hukum; c. Rencana Keuangan Bagian Hukum; d. Laporan Pertanggungjawaban Bagian Hukum; e. Laporan Kinerja Bagian Hukum; f. Laporan	10 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 13 dokumen	10 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 13 dokumen	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

No.	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tim Bagian Hukum.			
4	Meningkatnya kualitas analisis surat pengaduan masyarakat dan permasalahan yang di sampaikan kepada Dewan dan Setjen DPR RI. (surat Pimpinan dan AKD), Website serta SMS.	<p>a. Jumlah analisis surat pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Pimpinan DPR RI;</p> <p>b. Jumlah analisis surat yang disampaikan kepada AKD DPR RI;</p> <p>c. Jumlah surat website dan SMS.</p>	<p>300 surat</p> <p>700 surat</p> <p>1000 Surat</p>	<p>285 Surat</p> <p>472 Surat</p> <p>950 Surat</p>	<p>95%</p> <p>67,4%</p> <p>95%</p>

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Biro Hukum dan Dumas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020 dengan mengacu pada IKU/IKP sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatnya kinerja unit kerja dengan menerapkan perencanaan dan pengendalian program/kegiatan

secara terintegrasi. Selanjutnya, setelah diketahui sasaran program/kegiatan yang akan dicapai, dengan pelaksanaan (realisasi) kinerja setiap tahunnya akan diketahui seberapa besar atau berapa persentase tingkat capaiannya.

Berdasarkan angka capaian sasaran program dan kegiatan yang telah direalisasikan pada Tahun 2020 untuk Biro Hukum dan Dumas tersebut, diberikan evaluasi dan analisis capaian kinerja. Pendekatan evaluasi dan analisis ini akan diketahui seberapa besar tingkat capaian kinerja sasaran program dan kegiatan pada Tahun 2020. Hal ini sebagai metode untuk mencermati kinerja yang telah terjadi dengan membandingkan target dengan capaian/realisasi sebagai bahan untuk menilai diri atas kinerja suatu organisasi pada Biro Hukum dan Dumas.

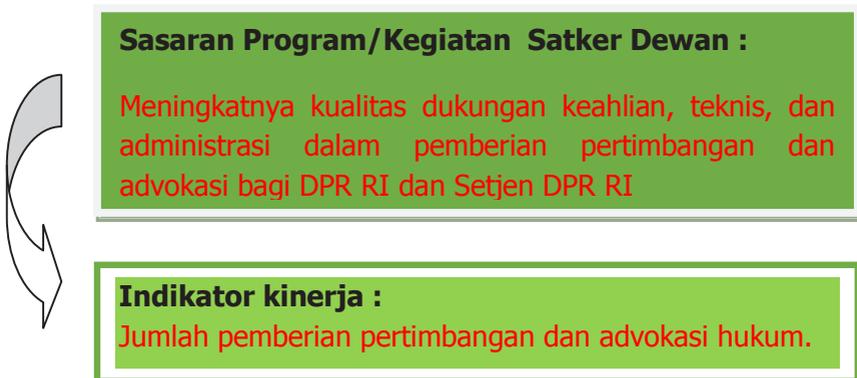
Sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen PK Tahun 2020, Biro Hukum dan Dumas dapat disampaikan evaluasi capaian kinerja sebagai berikut:

1. Pada **Satker Dewan** dengan sasaran program/*outcome* sebagai berikut :  
Meningkatnya kualitas dukungan keahlian, teknis, dan administrasi dalam pemberian pertimbangan dan advokasi bagi DPR RI dan Setjen DPR RI. Dengan satu indikator kinerja, yaitu jumlah pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

2. Pada **Satker Setjen** dengan sasaran program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas dukungan keahlian, teknis dan administrasi dalam perumusan produk hukum DPR RI dan Setjen DPR RI. Dengan satu indikator kinerja, yaitu jumlah perumusan produk hukum.
  - b. Meningkatnya kualitas dukungan keahlian, teknis dan administrasi dalam dokumentasi dan informasi hukum. Dengan 6 (enam) indikator, yaitu :
    - 1. Pengembangan JDIH;
    - 2. Rencana kegiatan Bagian Hukum;
    - 3. Rencanan Keuangan Bagian Hukum;
    - 4. Laporan pertanggungjawaban Bagian Hukum;
    - 5. Laporan Kinerja Bagian Hukum; dan
    - 6. Laporan Tim Bagian Hukum.
  - c. Meningkatnya kualitas analisis surat pengaduan masyarakat dan permasalahan yang di sampaikan kepada Dewan dan Setjen DPR RI. (surat Pimpinan dan AKD), *Website* serta *SMS*. Dengan 2 (dua) indikator :
    - 1. Jumlah analisis surat pengaduan masyarakat dan permasalahan yang disampaikan kepada Dewan dan Setjen DPR RI ;
    - 2. Jumlah surat website dan SMS yang disampaikan kepada Dewan dan Setjen DPR RI.

Untuk sasaran program dan kegiatan pada **Satker Dewan** dengan indikator kinerja dapat divisualisasikan dalam gambar sebagai berikut:

**Gambar 3.1**

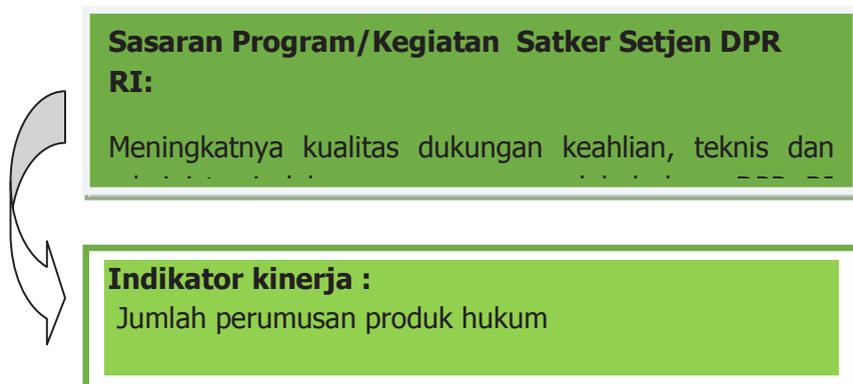


Sasaran program dari IKU/IKP pertama adalah meningkatnya kualitas dukungan keahlian, teknis, dan administrasi dalam pemberian pertimbangan dan advokasi bagi DPR RI dan Setjen DPR RI

Sasaran ini dicapai dengan indikator kinerja yaitu jumlah pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, dengan target kinerja sebanyak 16 dokumen atau 100%, dengan rincian : telah dicapai 5 (lima) dokumen untuk Surat Keputusan (SK) DPR RI, 5 (lima) dokumen untuk Surat Keputusan Pimpinan DPR RI, 1 (satu) dokumen untuk Surat Keputusan Sekjen DPR RI, 2 (dua) Dokumen untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 2 (dua) kajian) dan 1 (satu) advokasi.

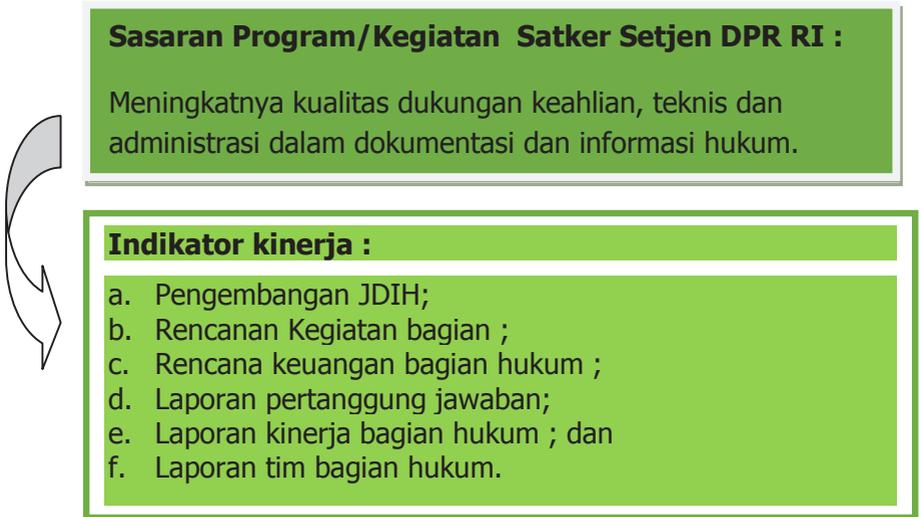
Selanjutnya untuk Satker Setjen, sasaran program/kegiatan dengan indikator kinerja digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3.2**



Pada **Satker Setjen**, dengan sasaran program **pertama** dari IKU/IKP ini adalah **"Meningkatnya kualitas dukungan keahlian, teknis dan administrasi dalam perumusan produk hukum DPR RI dan Setjen DPR RI"**. Sasaran ini dicapai dengan indikator kinerja yaitu jumlah perumusan produk hukum, dengan target kinerja 43 dokumen dan terealisasi 100%, dengan rincian : 10 dokumen (Persekjen), 1 (satu) dokumen (proleg), 1 (satu) dokumen evaluasi, 24 dokumen (MoU), 12 dokumen (Naskah Kebijakan). Untuk sasaran program pertama dengan indikator tersebut dapat tercapai secara optimal sesuai dengan target. Indikator ini melebihi target kinerja disebabkan karena kenaikan permintaan kajian atau pertimbangan dari unit pengusul.

**Gambar 3.3**



Sasaran program dari IKU/IKP kedua Satker Setjen adalah “Meningkatnya kualitas dukungan keahlian, teknis dan administrasi dalam dokumentasi dan informasi hukum”. Sasaran ini dicapai dengan indikator kinerja yaitu : Pengembangan JDIH, dengan target 10 dokumen; Rencana Kegiatan bagian, dengan target 1 (satu) dokumen; Rencana keuangan bagian hukum, dengan target 1 (satu) dokumen; Laporan pertanggung jawaban, dengan target 4 (empat) dokumen; Laporan kinerja bagian hukum, dengan target 1 (satu) dokumen, dan Laporan tim bagian hukum, dengan target 13 (tiga belas) dokumen. Untuk sasaran program kedua dengan indikator tersebut dapat tercapai secara optimal sesuai dengan target.

**Gambar 3.4**

**Sasaran Program/Kegiatan Satker Setjen :**

Meningkatnya kualitas analisis surat pengaduan masyarakat dan permasalahan yang disampaikan kepada Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI (surat

**Indikator kinerja :**

- a. Jumlah analisis surat pengaduan masyarakat dan permasalahan yang disampaikan kepada Dewan dan Setjen DPR RI;
- b. Jumlah surat website dan SMS yang disampaikan kepada Dewan dan Setjen DPR RI.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan/Penetapan Kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2020 telah disebutkan bahwa Kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat ditunjukkan dengan banyaknya surat pengaduan masyarakat yang ditangani secara akuntabel dan tepat waktu, sehingga *output* kinerja bagian ini adalah penanganan surat kepada Dewan dan Setjen, surat *website* dan *SMS* kepada Dewan dan Setjen DPR RI.

Penanganan surat pengaduan masyarakat dilakukan secara maksimal meskipun capaiannya tidak seperti yang telah

diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja baik surat kepada Dewan, Website dan SMS. Dalam Perjanjian Kinerja surat Pimpinan berjumlah 300 surat, dan surat Komisi/Badan berjumlah 700 surat, sedangkan surat *Website* dan *SMS* sebesar 1000 surat. Untuk Tahun 2020 surat Pimpinan DPR RI yang diteruskan kepada Komisi/Badan realisasinya sebanyak 285 surat atau 95%; surat yang diteruskan kepada Komisi/Badan sebanyak 472 surat atau 67,4%; dan surat yang masuk serta diteruskan melalui *Website* dan *SMS* berjumlah 950 atau 95%.

### **C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Anggaran yang dikelola oleh Biro Hukum dan Dumas meliputi Satker Dewan dan Satker Setjen. Berikut merupakan gambaran persandingan anggaran yang dikelola Biro Hukum dan Dumas Tahun 2019 – 2020 sebagaimana terdapat dalam Tabel 3.3 berikut.

Diketahui terjadi penurunan alokasi anggaran pada awal tahun kegiatan untuk anggaran tahun 2020 pada satker Dewan dibanding tahun 2019, yaitu pada satker Dewan untuk tahun 2019 sebesar 1.511.388.000,- dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 1.495.336.000,- yaitu turun sebesar Rp. 16.052.000,- atau 1,06 %

Selain itu, untuk alokasi anggaran untuk Satker Setjen pada awal tahun kegiatan untuk anggaran tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan, dimana pada anggaran

satker Setjen tahun 2019 sebesar Rp. 3.422.203.000,- dan pada tahun anggaran 2020 menjadi sebesar yaitu 1.845.532.000,-, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp. 1.576.671.000,- atau 46,07 %.

Namun demikian dalam proses berjalannya kegiatan pada tahun 2020, terjadi penghematan atau pemangkasan anggaran untuk alokasi penanganan akibat dampak *covid 19* dengan dilakukan revisi anggaran Biro Humas dan Dumas, yaitu untuk Satker Dewan revisi terakhir menjadi sebesar Rp. 545.322.000,- dan anggaran Satker Setjen menjadi sebesar Rp. 1,390,517,000,-

**Tabel. 3.3**  
**Perbandingan Anggaran yang dikelola Biro Hukum dan Dumas Tahun Anggaran 2019 dan 2020**

NO	Anggaran Biro Hukum dan Dumas	2019	2020 (setelah revisi )	TURUN
		Rp.	Rp.	Rp.
1.	Satker Dewan	1.511.388.000,-	545.322.000,-	966,066,000,-
2.	Satker Setjen	3.422.203.000,-	1,390,517,000,-	1,203,497,000,-
	Jumlah	4.933.591.000,-	1.935,839.000,-	2,997,752,000,-
	<i>Persentase Turun</i>			60,76 %

Sumber : Biro Hukum dan Dumas, 2020.

Untuk melihat capaian atau realisasi pengelolaan anggaran Biro Hukum dan Dumas pada Tahun Anggaran 2020, maka

disampaikan perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran pada empat triwulan sebagaimana Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Pengelolaan Anggaran Satker Dewan**  
**Selama Tahun Anggaran 2020**

No	Biro Hukum dan Dumas	Satker Dewan		
		Pagu	Realisasi	%
1	Triwulan I	1.485.336.000	98.655.00	6.6
2	Triwulan II	1.045.322.000	91.260.000	8.7
3	Triwulan III	545.322.000	102.203.000	18.7
4	Triwulan IV	545.322.000	130.491.000	23.9
	<b>Jumlah (revisi terakhir)</b>	545.322.000	422.600.000	77.5

*Sumber : Data Biro Hukum dan Dumas, 2020*

Pada Satker Dewan Tahun 2020 dengan pagu sebesar Rp. 545,322,000,- telah terealisasi selama empat triwulan sebesar Rp. 422,609,000 atau 77,5 %.

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Pengelolaan Anggaran Satker Setjen**  
**Selama Tahun Anggaran 2020**

No	Biro Hukum dan Dumas	Satker Setjen		
		Pagu	Realisasi	%
1	Triwulan I	1,845,532,000,-	323,781,300,-	17.54
2	Triwulan II	1,409,133,000,-	324,934,400,-	23.06
3	Triwulan III	1,409,133,000,-	383,546,800,-	27.22
4	Triwulan IV	1,390,517,000,-	325,667,100,-	23.42
	Jumlah(revisi terakhir )	1,390,517,000,-	1,357,929,600,-	97.66

*Sumber : Data Biro Hukum dan Dumas, 2020.*

Sedangkan pada Satker Setjen Tahun 2020 dengan pagu sebesar Rp.1.390.517.000,- telah dapat direalisasikan selama empat triwulan sebesar Rp.1.357.929.600,- atau 97,66 %.

Berdasarkan data pagu anggaran dan realisasi anggaran tersebut di atas dapat diberikan penjelasan bahwa, rendahnya tingkat realisasi khususnya pada Satker Dewan Tahun 2020 dikarenakan kegiatan penanganan perkara perdata/tata usaha negara, rapat-rapat tim advokasi, perjalanan untuk kunjungan tim hukum disesuaikan dengan adanya jumlah perkara hukum yang masuk dan ditangani. Perlu kami sampaikan bahwa penanganan perkara yang ditangani oleh Tim Kuasa Substitusi Hukum berada di wilayah DKI Jakarta (dalam kota). Disamping itu, penanganan

perkara DPR ditangani oleh Tim Kuasa Substitusi baik dalam penyusunan dokumen perkara maupun untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan indeks anggaran yang dipertanggungjawabkan tetap menggunakan Standar Biaya Masukan. Sementara alokasi anggaran untuk antisipasi adanya perkara DPR menggunakan indeks satuan biaya yang diperuntukan bagi Anggota DPR RI.

Dalam praktek, tidak terjadi korelasi antara besaran pagu dan realisasi/penyerapan anggaran pada tingkat pencapaian kinerja program/kegiatan di Biro Hukum dan Dumas. Kondisi ini terjadi baik untuk Satker Dewan maupun untuk Satker Setjen, yang dapat dijelaskan bahwa Dewan sebagai lembaga politik, penyediaan pagu anggarannya dalam rangka antisipasi kegiatan dewan yang masih mungkin terjadi, sehingga bersifat antisipasi penyediaan anggaran. Contohnya penanganan pada perkara-perkara hukum DPR RI yang akan ditangani, walaupun tersedia anggarannya, namun belum tentu digunakan/direalisasikan apabila memang tidak ada perkara sebanyak yang diperkirakan/ditargetkan.

Sedangkan untuk Satker Setjen dengan tingkat penyerapan atau realisasi anggaran sebesar **1,357,929,600** atau **97.66%**, secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa penyerapannya sudah sangat baik dalam arti realisasi anggaran dapat dicapai dengan optimal. Adapun target kinerja tupoksi tetap sesuai target 100 %. Kondisi ini juga menunjukkan, bahwa untuk Satker Setjen justru

terjadi optimalisasi realisasi anggaran, dengan penyerapan 97,66 % mengingat adanya revisi atau pengalihan sebagian anggaran dari pagu anggaran Satker Setjen semula untuk keperluan penanggulangan penanganan akibat dampak covid 19 sebesar Rp. 455.015,000,- —tanpa mempengaruhi kinerja program/kegiatan Biro Hukum dan Dumas, yang tetap dapat mencapai target, seperti dalam penanganan dukungan perkara hukum dan analisis surat aspirasi pengaduan masyarakat.

Selanjutnya capaian realisasi anggaran Tahun 2020 untuk kedua Bagian di Biro Hukum dan Dumas, yaitu Bagian Hukum dan Bagian Pengaduan Masyarakat sebagaimana tabel 3.6 dan 3.7 berikut ini.

**Tabel 3.6**  
**CAPAIAN REALISASI ANGGARAN**  
**BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

*Bagian Hukum*

MAK	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN I S.D IV		K E T
			REALISASI		
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>SATKER DEWAN</b>					
<b>5801.004 Dokumen Pertimbangan Hukum dan Litigasi DPR RI</b>					
051	Penanganan Perkara Hukum Baik di Dalam	545.322.000	422.609.000	77	

	maupun di luar Pengadilan oleh Tim Kuasa				
A	1) Kegiatan rapat-rapat	66.222.000	50.259.000	76	
B	2) Kegiatan Pencetakan	2.400.000	0	0	
C	3) Kegiatan Mengundang Pakar	75.600.000	40.500.000	54	
D	4) Kunjungan kerja apabila ada perkara di daerah	0	0	0	
E	5) Kegiatan Tim Kuasa DPR RI.	401.100.000	331.850.000	83	
<b>SATKER SETJEN</b>					
<b>5787. 001 Pertimbangan dan Advokasi Hukum, Rumusan Produk Hukum, serta Layanan Pengaduan Masyarakat</b>					
052	Pemberian Pertimbangan dan Advokasi Hukum, Perumusan Produk Hukum, dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	783.875.000	775.723.000	98,9	
A	Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan dan Advokasi Hukum	6.324.000	6.306.000	99,7	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	0	0	
521211	Belanja Bahan	1.674.000	1.656.000	98,9	
522151	Belanja Jasa Profesi				
521213	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				

<b>B</b>	<b>Perumusan Produk Hukum</b>	<b>547.395.000</b>	<b>544.798.000</b>	99,5	
521211	Belanja Bahan	94.295.000	94.248.000	99,9	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	441.000.000	438.900.000	99,5	
522151	Belanja Jasa Profesi	6.700.000	6.250.000	93,2	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	0	0	0	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.400.000	5.400.000	100	
<b>C</b>	<b>Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)</b>	<b>230.156.000</b>	<b>224.619.000</b>	<b>97,5</b>	
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	10.500.000	10.475.000	99,7	
521211	Belanja Bahan	12.120.000	12.108.000	99,9	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	161.700.000	156.200.000	96,5	
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	7.332.000	7.332.000	100	
523199	Belanja pemeliharaan Lainnya	9.636.000	9.636.000	100	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	6.368.000	6.368.000	100	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000	1.200.000	100	
524115	Belanja Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi COVID-19	21.300.000	21.300.000	100	

Sumber : Bagian Hukum, Desember 2020

**Tabel 3.7**  
**CAPAIAN REALISASI ANGGARAN**  
**BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

*Bagian Pengaduan Masyarakat*

MAK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN I S.D IV		KET
			REALISASI		
			Rp.	%	
053	Penyiapan bahan Analisa Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	510.180.000	494.829.600	96,99	
521111	Belanja Keperluan Kantor	111.185.000	110.754.400	99,61	
	Honorarium tenaga kontrak	111.185.000	110.754.400	99,61	
521211	Belanja Bahan	77.794.000	77.625.000	99,78	
	Jamuan Rapat –Rapat, Penjilitan dan Cetak	77.794.000	77.625.000	99,78	
521213	Honor Output Kegiatan	118.400.000	111.000.000	93,75	
	Honorarium Tim Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	118.400.000	111.000.000		
521241	Belanja Barang Non Operasional Penangan Covid-19 untuk ASN WFO	20.586.000	20.586.000	100,00	
524111	Belanja Perjalanan Biasa dan Luar Kota	91.915.000	91.914.200	99,99	
	Perjalanan Dinas Luar Kota	91.915.000	91.914.200	99,99	
524115	Belanja Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi Covid-19	60.450.000	60.450.000	100,00	
521131	Biaya Paket data dan Komunikasi	7.350.000	0	0,00	

*Sumber : Bagian Dumas, Desember 2020*



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum dan Dumas Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas visi, misi, tujuan dan sasaran menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024. Secara umum capaian kinerja Tahun 2020 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan diantara sasaran strategis tersebut memperoleh nilai capaian lebih dari 100 %. Namun demikian, masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditentukan, artinya masih di bawah 100%.

Sasaran strategis di Biro Hukum dan Dumas terdapat sasaran strategis Biro Hukum dan Dumas yang ditargetkan untuk diwujudkan dalam Tahun 2020. Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis ini menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja diupayakan untuk mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya seluruh capaian sasaran strategis di atas telah dievaluasi dan analisis pada Bab III huruf B (evaluasi dan analisis capaian kinerja).

Tingkat capaian kinerja program/kegiatan untuk Satker Dewan dengan satu indikator, apabila secara persentase dijumlahkan seluruhnya, maka akan didapat nilai rata-rata 100 % atau sangat baik. Kondisi ini dapat dijelaskan karena dari indikator tersebut yakni jumlah kegiatan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum dicapai 16 dokumen dari jumlah target yang direncanakan 16 dokumen atau 100 %. Sedangkan dari segi realisasi anggarannya Satker Dewan Tahun 2020 sebesar Rp. 422.600.000 atau 77,5%.

Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan untuk Satker Setjen, dengan 3 (tiga) sasaran atau program dan diukur dengan 9 (Sembilan) indikator. Apabila secara persentase dijumlahkan seluruhnya dan dibagi 9 (Sembilan) indikator, maka didapat nilai yang rata-rata cukup baik. Kondisi ini dapat kita jelaskan karena dari 9 (Sembilan) indikator terdapat satu indikator dapat mencapai diatas 100% yakni indikator jumlah perumusan produk hukum, namun ada 2 (dua) indikator yang tidak mencapai 100 % yaitu jumlah analisis surat pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Dewan dan Setjen DPR RI; dan jumlah surat *website* dan SMS yang disampaikan kepada Dewan dan Setjen DPR RI. Hal itu dikarenakan ketergantungan secara eksternal sehingga mempengaruhi jumlah surat pengaduan yang masuk untuk Pimpinan dan AKD serta *website/SMS*.

Sedangkan dari realisasi anggaran untuk Satker Setjen Tahun 2020 sebesar Rp. **1,357,929,600,-** atau **97,66 %** dari DIPA Tahun 2020 sebesar **1,390,517,000,-**. Realisasi anggaran yang sangat baik ini tidak terlepas dari adanya kondisi pandemik *covid-19* yang mengharuskan Pemerintah melakukan pemotongan postur APBN baik – Anggaran Dewan maupun anggaran Setjen untuk mengatasi dan menanggulangi dampak dari adanya pandemi *covid 19*, sehingga menyebabkan anggaran yang dikelola oleh Biro Hukum dan Dumas mengalami beberapa kali revisi, yang berakibat pada makin mengecilnya jumlah alokasi anggaran yang dikelola oleh Biro Hukum dan Dumas. Meski demikian dalam hal penanganan surat pengaduan masyarakat realisasinya masih tergantung tindak

lanjut oleh Pimpinan/AKD DPR RI dan sistem aplikasi yang belum efektif.

Selanjutnya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Biro Hukum dan Dumas untuk memperbaiki kinerja Tahun 2020 dan menghadapi tantangan ke depan antara lain:

1. Perlunya meningkatkan koordinasi yang intensif baik internal dan eksternal antara para pejabat dan pegawai di lingkungan Biro Hukum dan Dumas, guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Setjen yang tertuang dalam Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024.
2. Meningkatkan komitmen antar unit kerja di lingkungan Biro Hukum dan Dumas dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
3. Perlunya komitmen dari seluruh jajaran JPT dalam memenuhi target program yang telah ditetapkan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan anggaran secara efisien dan efektif melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada *outcome* sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai, serta dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak.
5. Meningkatkan pembinaan SDM pegawai, baik kualitas maupun kompetensi, juga memperhatikan jumlah agar sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang tugas dan fungsi unit kerja-unit kerja di lingkungan Biro Hukum dan Dumas.
6. Mengoptimalkan kinerja kegiatan dengan memperhatikan penyerapan anggaran – sesuai rencana yang ditetapkan dan

berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

7. Mengoptimalkan dukungan terhadap peran lembaga Setjen DPR RI sebagai unsur pendukung (supporting system) DPR RI dengan tetap memperhatikan dinamika lembaga DPR RI sebagai lembaga politik, dan diupayakan agar tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan negara.
8. Perlunya perbaikan Aplikasi Pengaduan Masyarakat dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) di Lingkungan Setjen DPRRI khususnya untuk sistem JDIH (*jdih.dpr.go.id*) yang saat ini masih dalam domain website DPR RI agar dapat segera terintegrasi dengan sistem JDIH Nasional.